

BAB II

SEJARAH DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN MALAYSIA

Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia 2, dengan latar belakang penjajahan yang cukup lama Malaysia berusaha membangun negaranya melalui sumber daya alam yang dipunyai. Namun, seiring perkembangan jaman dan kesadaran tentang terbatasnya sumber daya alam, muncul sebuah gagasan baru untuk menjadikan pariwisata sebagai komoditasnya. Dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang sejahtera dan modern, Malaysia berusaha mengembangkan pariwisatanya, meskipun ada beberapa peristiwa yang sempat menghambat dan memperlambat laju pertumbuhan pariwisatanya.

A. Sejarah Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara perintis ASEAN yang memiliki luas wilayah 329,758 km² terletak antara 1° sampai 7° Lintang Utara dan 100° sampai 119° Bujur Timur dengan suhu rata-rata 21°C hingga 32°C (Sabah Departement of Statistics, 2002). Malaysia memiliki dua wilayah daratan utama yang terpisah oleh Laut China Selatan yaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia, yang berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan dan Malaysia Timur, yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara.

Malaysia adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang mempunyai komposisi penduduk multi etnis. Mayoritas penduduk Malaysia adalah etnis Melayu yang mempunyai jumlah persentase sebesar 50.1% dari total jumlah penduduk Malaysia, etnis China 22,6%, kelompok pribumi selain Melayu 11,8%, India 6,7%, dan kelompok lain menyumbang 0,7%. Sedangkan penduduk bukan warga negara adalah 8,2% dari populasi penduduk Malaysia. Konteks multikultural ini membuat Malaysia masyarakat yang sangat kaya, dengan beragam agama, makanan, budaya, dan adat

istiadat (Sawe, 2018). Pada awalnya cikal bakal dari wilayah Malaysia adalah wilayah yang didalamnya berdiri kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan kecil tersebut tunduk pada kerajaan-kerajaan yang memiliki kendali kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih besar yang berpusat di Kamboja atau di Indonesia yang mempunyai dua kerajaan besar seperti Majapahit pada tahun 1300-an hingga awal abad 16 dan Sriwijaya yang berpusat di Sumatra dan Jawa (bin Adil, 1974). Agama Islam mulai masuk ketika para pedagang dari bangsa India dan Arab mulai masuk wilayah tersebut, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan Malaka yang menjadi pusat dari perdagangan dan penyebaran agama Islam pada tahun 1400 Masehi di bawah pimpinan seorang pangeran dari Palembang, Sumatra. Agama Islam ternyata memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan bangsa Melayu yang mendiami wilayah tersebut, hal itu dapat dilihat dari corak kebudayaan dan peradaban bangsa Melayu-Malaysia. Berkembangnya kerajaan Melayu Malaka dengan pesat memberi pengaruh yang kuat kepada wilayah dan pulau-pulau di sekitarnya, sehingga menarik bangsa-bangsa dari wilayah Eropa untuk datang seperti Portugis, Inggris dan Belanda. Bangsa Portugis pertama kali datang pada tahun 1511 dan kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Awal kedatangan bangsa Inggris pada tahun 1769 bermula ketika bangsa Inggris kala itu menduduki pulau Balambangan dan mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. Tahun 1867 Inggris mulai agresif dengan menyebarkan pengaruhnya seiring dengan ditematkannya pasukan di Pulau Pinang, Singapura, dan Malaka. Sepanjang periode pemerintahan kolonial Inggris, Malaysia kemudian berkembang menjadi terdiri dari berbagai populasi yang terpisah-pisah dan beraneka ragam, seperti Melayu, Cina, India yang diimigrasikan ke Malaysia untuk menjadi pekerja di industri karet dan timah disana (Omar, 2001). Pada tahun 1941 dan 1942 didalam Perang Dunia II, wilayah Malaya, Serawak, dan Borneo Utara berhasil diambil alih kekuasaannya oleh Jepang hingga Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945. Masalah etnis adalah salah satu faktor yang menjadikan Malaysia sulit untuk mendapatkan kemerdekaan secara penuh dan mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Penyebab utama dari masalah tersebut adalah perbedaan pandangan tentang masalah agama, kebudayaan dan perbedaan bahasa di antara golongan etnis di Malaysia. Tahun 1957 Malaysia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris dan menjadi negara anggota PBB pada tahun yang sama.

Sejak Malaya mendapatkan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957, maka gagasan untuk membentuk negara Malaysia mulai dicanangkan. Awalnya keadaan Malaya pada masa-masa awal kemerdekaannya masih belum stabil karena adanya ancaman dari golongan komunis yang memberi ancaman terhadap kedudukan raja-raja Melayu yang didukung oleh Inggris. Namun setelah golongan komunis di Malaysia dapat dilumpuhkan sedikit-demi sedikit keadaan di Malaya berangsur aman kembali. Keadaan ekonomi di Malaysia sedikit demi sedikit mulai berkembang, hubungan dengan luar negeri mulai bertambah. Akhirnya keadaan darurat yang telah dimulai sejak 1948 dicabut pada 31 Agustus 1960.

1. Sistem Parlemen di Malaysia

Sejak awal kemerdekaannya, parlemen Malaysia didominasi oleh koalisi dari multipartai yang sering disebut Barisan Nasional. Barisan Nasional (National Front) dibentuk pada 1973 sebagai sebuah koalisi politik Malaysia yang merupakan kelanjutan dari Aliansi Partai (Alliance). Beberapa partai yang ikut bergabung dalam Barisan Nasional adalah sebagai berikut : Malaysian Indian Congress (MIC), Partai Pesaka Bumiputera Bersatu, United Malays National Organization (UMNO), dan Gerakan Rakyat Malaysia (Malaysian People's Movement). Malaysia membagi kekuasaan legislatifnya menjadi 2, antara lain legislatur negeri dan legislatur persekutuan. Parlemen Malaysia bersifat bikameral yang terdiri dari dewan tinggi, dewan rendah, dan Dewan Rakyat (mirip Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia), serta Senat atau Dewan Negara (mirip Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia). Anggota Dewan Rakyat berjumlah 222 orang dan mempunyai masa jabatan maksimal 5 tahun. Senator berjumlah 70 orang yang mempunyai masa jabatan 3 tahun. Kekuasaan eksekutif di

Malaysia dipegang oleh perdana menteri dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh kabinet dibawah pimpinannya. Konstitusi Malaysia telah menetapkan bahwa seorang perdana menteri harus merupakan anggota dari dewan rendah atau disebut juga dewan rakyat, yang direstui oleh yang di-pertuan agung atau raja Malaysia dan mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota di dalam parlemen. Sedangkan kabinet adalah anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Negara. Pemilihan umum parlemen dilaksanakan paling sedikit lima tahun sekali.



Gambar 1. peta Malaysia
sumber: www.worldatlas.com, 2018

2. Pembagian Kekuasaan

Kepala Negara Negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dengan kandidat para Raja dari sembilan negara bagian yang masih dipimpin oleh Raja. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, Perdana menteri pertama Malaysia adalah Tun Abdul Rahman yang menjabat pada tahun 1961, yang mengusulkan pembentukan Malaysian Federation of Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan Serawak. Akan

tetapi Singapura keluar dari federasi tersebut pada tahun 1965 dikarenakan adanya perbedaan ekonomi dan perbedaan ras. Perdana Menteri Malaysia yang kedua adalah Tun Abdul Razak, pada era kepemimpinannya, Tun Abdul Razak membuat program baru yang disebut *New Economic Policy* (NEP) (Ismail, 1976). NEP adalah program jangka panjang pemerintah Malaysia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Malaysia dan secara nasional meningkatkan ekonomi nasional. Dari program NEP inilah pemerintah kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat, dan menomorsekikan-kan kepentingan asing. Dari NEP ini pulalah pemerintah menggali sumber daya yang terkandung dalam negara Malaysia untuk digunakan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat. Penggalian potensi tidak hanya dilakukan dengan menggali sumber daya alam, tetapi peningkatan sumber daya manusia mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para penduduk Malaysia di berbagai bidang yang nantinya akan membangun dan menjadi tulang punggung kemajuan Malaysia untuk mencapai cita-cita menjadi negara yang maju.

Sebelum mencapai kemerdekaan, ekonomi Malaysia banyak dipengaruhi oleh penjajah yaitu pemerintah kolonial Inggris yang membuat berbagai langkah bagi memperbaiki dan mengembangkan ekonomi negara. Pihak pemerintah kolonial Inggris hanya melakukan pengembangan dan pembangunan untuk memajukan sektor ekonomi yang dapat memberi keuntungan secara langsung kepada mereka tetapi tidak memberi timbal balik yang positif terhadap rakyat Malaysia (Helmi, 2005). Pembangunan hanya akan dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris ditempat-tempat yang mendatangkan keuntungan, sedangkan bagi wilayah yang tidak mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial hanya di biarkan saja tanpa disentuh. Kemajuan infrastruktur yang di bangun oleh pemerintah kolonial Inggris hanya diprioritaskan untuk masyarakat daerah-daerah

tertentu yang mempunyai keunggulan dimata pemerintah kolonial.

B. Perkembangan perekonomian Malaysia

Pada masa pasca kemerdekaan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu Malaysia pada umumnya adalah bekerja sebagai petani di sawah dan perkebunan sebagai penyadap getah karet, nelayan, peternak kecil-kecilan dan di daerah tertentu berkerja sebagai buruh pertambangan. Orang-orang dari etnis Cina umumnya bekerja di bidang perniagaan dan perdagangan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi lokal, daerah dan nasional (Eing, 1979). Sejak dari awal kemerdekaannya, perekonomian Malaysia di dukung oleh ekspor hasil produksi bahan baku ke luar negeri. Timah, karet, kayu, minyak mentah, dan minyak sawit merupakan komoditas utama yang menjadi pendukung sektor perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional Malaysia. Hal ini pertama kali didukung oleh kebijakan Kerajaan Malaysia yang menerapkan rancangan pembangunan yang teratur yang disebut Rancangan Pembangunan Ekonomi (RPE1) atau Rancangan Malaya Pertama pada tahun 1956-1960. Selain itu ada lagi kebijakan lain yang mengatur tentang urusan pertanahan yang disebut FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan), dibuat tahun 1956 dan mempunyai tujuan untuk mengatasi kekurangan tanah serta membantu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan kaum petani (Iqbal, 2016). Setelah program tersebut berjalan, pemerintah Malaysia menambah lagi sebuah program yang berpihak pada rakyat yaitu RPE2 pada yang dikeluarkan tahun 1961. Kedua RPE tersebut hanya berfokus pada bidang pertanian yang pada saat itu adalah tumpuan utama perekonomian Malaysia. Pada masa Tun Abdul Razak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Malaysia membuat suatu sistem ekonomi yang disebut NEP (New Economic Policy) yang sering disebut sebagai Dasar Ekonomi Baru dalam bahasa Malaysia. Munculnya kebijakan tersebut, kemudian diikuti oleh kebijakan yang lain seperti Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Dasar Perindustrian Negara, Dasar Pertanian Negara, Dasar Persyarikatan Malaysia. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Malaysia, dan untuk membangun ekonomi negara. Dasar Perindustrian Negara yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia merupakan suatu program yang dilakukan oleh Malaysia agar mencapai suatu perubahan. Agar tidak hanya dikenal sebagai negara agraris tetapi juga sebagai suatu negara yang maju dengan menjadikan sektor industri sebagai salah satu aspek penyokong ekonomi negara tersebut dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia.

Pada dasarnya, perekonomian Malaysia pada awal berdiri didasarkan hampir seluruhnya pada produksi komoditi primer, terutama karet dan timah, dan tergantung sepenuhnya pada pasar Inggris sampai dengan akhir tahun 1967. Namun dalam tiga dekade berikutnya, Malaysia berhasil bertransformasi menjadi negara ekonomi industri berorientasi ekspor yang berkembang cepat, dengan kebijakan ekonomi dan manajemen industri yang tepat sebagai jalan setapak menuju pembangunan yang cepat (Masuyama, 1997). Kemajuan suatu negara di bidang industri juga merupakan suatu tolak ukur majunya suatu kebudayaan negara tersebut, juga merupakan indikator berkembangnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan di negara tersebut. Dekade 1990-an adalah awal dari penancangan industrialisasi yang ditargetkan oleh Malaysia untuk mencapai cita-citanya menjadi negara industri penuh pada tahun 2020. Program tersebut adalah ide dan prakarsa dari Perdana Menteri Dr. Mahathir bin Muhammad (Shamsul, 2012). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, langkah termudah yang ditempuh Malaysia adalah melalui industri otomotif. Alasan Malaysia memilih industri otomotif menjadi pilihan sebagai pijakan awal Malaysia menuju negara maju adalah karena secara ekonomi, hal tersebut tidaklah terlepas dari perkembangan dunia yang selama ini mengarah pada tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, selain dari itu Malaysia akan mampu menjual hasil ari produk otomotifnya di dalam maupun di luar negeri yang kemudian akan berdampak terhadap berjalannya roda industri dalam negeri Malaysia sendiri. Di sisi lain, industri otomotif adalah sebuah industri yang membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan maupun ketersediaan modal untuk menyokong industri tersebut. Malaysia ingin menunjukkan Keunggulan yang

dimilikinya kepada dunia bahwa Malaysia kini telah mampu untuk menyongsong sebagai negara maju dan siap bersaing dengan negara maju lainnya, dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan. Langkah tersebut tidak serta merta langsung dapat diterapkan, namun pelaksanaannya dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap. Tahap-tahap yang pertama dilaksanakan adalah pembangunan Sirkuit yang mempunyai standar internasional di kawasan Sepang, yaitu sebuah daerah yang awalnya terpencil yang berlokasi di negara bagian Selangor. Sirkuit tersebut kemudian diberi nama Sepang International Circuit (SIC) dan diresmikan oleh PM. Dr. Mahathir Mohammad pada tanggal 9 Maret 1999 setelah melalui proses pengerjaan 14 bulan. Kedua, bergabungnya perusahaan minyak nasional Malaysia PETRONAS dengan salah satu tim peserta Formula 1 milik Peter Sauber yang bemarkas di Swiss yaitu Sauber F1 Team yang kemudian berubah namanya menjadi Sauber Petronas F1 Team pada tahun 1995. Ketiga, membeli Lotus Engineering untuk kemudian mengadakan program mobil nasional PROTON.

Jika dilihat secara umum, Malaysia merepresentasikan dirinya sebagai negara berkembang yang memiliki kesiapan dalam menyiapkan dirinya untuk melangkah ke arena panggung dunia internasional dengan mengandalkan *soft power diplomacy*. Ketiga program awal tersebut adalah cara halus dari pemerintah Malaysia untuk mencari sebuah pengakuan yang ditujukan pada citra diri dan prestige bangsa. Dengan meningkatnya citra diri dan prestige bangsa, diharapkan akan semakin memudahkan untuk menarik wisatawan untuk datang ke Malaysia, sedangkan saat ini pariwisata adalah sektor ekonomi non-migas yang paling strategis untuk meningkatkan bidang perekonomian sehingga akan mempengaruhi meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan mereka secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut secara politis bermanfaat sebagai sarana untuk menguatkan posisi Malaysia agar dipandang dunia Internasional di tengah situasi politik dunia yang tidak stabil.

NEP memiliki dua program, yaitu memusnahkan kemiskinan rakyat Malaysia dan merestrukturisasi masyarakat Malaysia sehingga identifikasi ras dengan fungsi ekonomi dan

lokasi geografi perlahan dikurangi, dan kedua tujuan tersebut direalisasikan melalui ekspansi ekonomi yang cepat. Kebijakan ini diterjemahkan kedalam dua kebijakan, yaitu: bantuan terhadap etnis Melayu (Bumiputera) dan perencanaan pembangunan regional. Kebijakan pertama dalam bentuk peraturan dan institusi yang dirancang untuk membantu Bumiputera untuk masuk dalam sektor perkotaan, khususnya industri, perdagangan dan keuangan, termasuk kepemilikan dan manajemen perusahaannya. Di bawah NEP, konsep pembangunan regional pun berubah, bukan lagi sekedar masalah kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan nasional disektor primer (pertanian) tapi lebih pada mengurangi disparitas regional antar etnis dan meningkatkan pendapatan, kesehatan dan pendidikan etnis Melayu. (Niles Hansen, et.al.m 1990:207).

C. New Economic Policy Sebagai Pijakan Awal Ekonomi Malaysia.

New Economic Policy atau sering disebut juga Dasar Ekonomi Baru dalam bahasa Melayu adalah suatu program yang diluncurkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Husein. Program ini bergerak di bidang *sosio-ekonomi* yang tujuan akhirnya adalah untuk kemajuan Malaysia dan integrasi nasionalnya berdasarkan dari potensi yang dimiliki dari dalam negeri sendiri. Sasaran pertama dari program ini yaitu, membasmi kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan menambah jumlah lapangan kerja dan peningkatan pendapatan untuk seluruh rakyat Malaysia. Yang kedua yaitu, mengurangi dan menghapus ketidakseimbangan ekonomi dengan cara mempercepat proses penyusunan masyarakat Malaysia, dimana salah satu indikator bahwa sebuah negara itu utuh dan bersatu adalah terciptanya keseimbangan ekonomi nasional di negara tersebut. Dalam pelaksanaannya, NEP/DEB mempunyai dua program inti, yakni memusnahkan kemiskinan di Malaysia dan merestrukturisasi masyarakat Malaysia sehingga identifikasi ras dengan fungsi ekonomi dan lokasi geografis perlahan dikurangi, dan kedua tujuan tersebut direalisasikan melalui ekspansi ekonomi yang dilakukan dengan cepat. Kebijakan ini diimplementasikan dalam

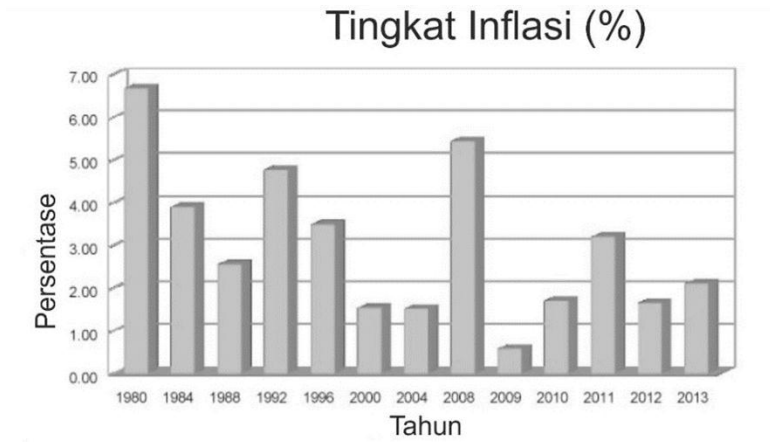
dua kebijakan, yaitu: pemberian bantuan terhadap etnis Melayu (Bumiputera) dan pembangunan regional. Kebijakan pertama implementasinya yaitu dengan bentuk dalam pembuatan peraturan dan institusi yang dirancang untuk membantu Bumiputera untuk masuk dalam sektor industri, perdagangan dan keuangan, termasuk manajemen dan kepemilikan perusahaannya. Di bawah NEP, konsep pembangunan regional pun kemudian berubah menjadi bukan hanya sekedar masalah kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan nasional disektor primer (pertanian) tapi lebih pada mengurangi disparitas regional antar etnis dan meningkatkan pendapatan, kesehatan dan pendidikan etnis Melayu (Hansen, 1990). Untuk mendukung program DEB yang *kedua*, pemerintah membuat beberapa strategi kebijakan yang diantaranya:

1. Mengikutsertakan berbagai golongan etnis di Malaysia dalam sektor utama dengan tujuan agar tercipta keseimbangan dalam struktur dalam bidang tenaga kerja.
2. Mendorong terbentuknya suatu masyarakat perindustrian dan perdagangan di kalangan etnis Melayu dan kaum Bumiputera agar mereka dapat menguasai sekurangnya 30% dari segala jenis kegiatan ekonomi.
3. Memberi jatah yang lebih besar kepada rakyat Malaysia dalam kepemilikan sektor produktif, khususnya perhatian utama difokuskan terhadap kaum Bumiputera yang masih tertinggal dari etnis yang lain.

NEP/DEB yang dirancang oleh pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdul Razak adalah sebuah program jangka panjang yang direncanakan berjalan selama 20 tahun yang diawali pada tahun 1970 hingga berakhir tahun 1990. Konsentrasi program penghapusan kemiskinan *adalah* pada wilayah pedesaan dan kawasan pelosok, pada awal berjalannya program tersebut tahun 1970 jumlah penduduk Malaysia yang hidup di bawah garis kemiskinan ada sekitar 49,3% dimana pendapatan mereka hanya RM 200 pada tahun 1970. (Sundaram, 1986). Peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dengan pemberian fasilitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, air bersih, dan listrik. Pemberian hak kepada kaum miskin untuk

mendapat bantuan dari pemerintah seperti rumah murah, beasiswa anak sekolah, buku teks dan makanan tambahan untuk anak-anak.

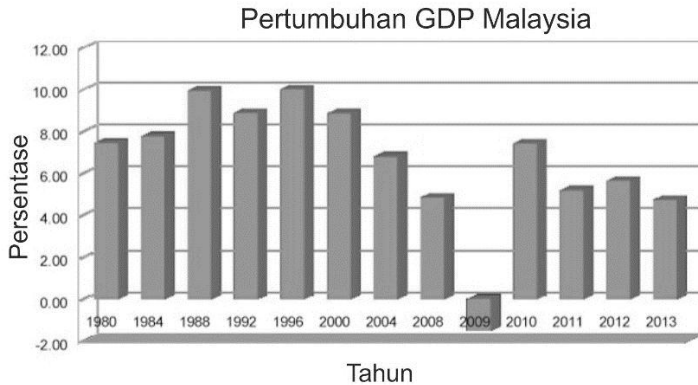
Program DEB/NEP yang dilaksanakan oleh Malaysia terlihat menuai hasil yang relatif positif, pada tahun 1981 laju inflasi Malaysia turun dari sekitar 10% menjadi hanya sekitar 0,3% di tahun 1983. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil juga terjadi pada hampir sepanjang dekade 1990- an. Sejak 1988 laju pertumbuhan selalu di atas 8% dan pada tahun 1989, 1990, 1994 dan 1995 bahkan di atas 9,0% pertumbuhan pendapatan per kapitanya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik kecuali tahun 1992 mencapai 7,8%. (Cheng, 2002).



Grafik 1. Tingkat Inflasi Malaysia 1980-2013

sumber : <http://www.eiiff.com>, 2018

Menjelang tahun 90-an, ketika program DEB/NEP tersebut dijadwalkan berakhir. Program jangka panjang tersebut terbukti mampu untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Malaysia. Pada laporan keenam tahun 1990, angka kemiskinan berada di kisaran 15%, angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan angka 49,3% pada tahun 1970 (world bank, 2018).



Grafik 2. GDP Malaysia 1980-2013
 sumber: <http://www.eiiff.com>, 2018

Langkah dan kebijakan yang diambil oleh Malaysia merujuk pada DEB yang merupakan tujuan utama pemerintah Malaysia guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan menghapus ketimpangan ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang terdiri dari banyak etnis. Berdasarkan pada asas kesimbangan antar etnik, pemerintah membuat program di bidang pertambangan, pembinaan, *pengangkutan* dan pertanian. Program jangka panjang DEB/NEP berakhir pada tahun 1990, akan tetapi setelah berakhirnya program tersebut pemerintah Malaysia tidak hanya berhenti disitu saja. Program DEB/NEP diteruskan dengan program baru yang diberi nama Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Dengan lanjutan program DEB/NEP yang bernama DPN adalah sebuah bentuk konsistensi pemerintah Malaysia dengan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Malaysia dengan cara mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri. Fokus dari program DPN tidak jauh berbeda dengan DEB/NEP yaitu mengurangi kemiskinan dan menyusun/mengontrol sosial masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan yang di nilai merupakan langkah yang sangat maju dan ambisius. *Pertama* secara objektif, program DPN ingin mengukuhkan kestabilan bidang ekonomi, sosial dan politik melalui pembangunan di dalam perkotaan dan di pedesaan. *Kedua*,

merupakan langkah sensasional, yaitu keinginan untuk dapat menjadi negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial, ekonomi, nilai, etika, moral, kualitas hidup dan mengamalkan prinsip yang adil dan kemajuan ekonomi. Pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Dr. Mahathir bin Mohammad meluncurkan program pembangunan *selanjutnya yang sangat fenomenal yaitu Vision 2020 atau Wawasan 2020* pada tahun 1990. Wawasan 2020 telah tertulis dalam kertas kerja Dr. Mahathir Mohammad yang berjudul *Laluan ke Depan (The Way Forward)* yang telah dipresentasikan pada 28 February 1991 kepada Majelis Perniagaan Malaysia (Mohamad, Vision 2020 = Wawasan 2020 / Dato' Seri Mahathir Mohamad., 1991). Visi 2020 bertujuan untuk menciptakan Malaysia bersatu dan toleran secara ekonomi dan etika, yang ditopang dengan ekonomi yang maju, kompetitif dan dinamis. Strategi kunci visi ini adalah peningkatan dan pelaksanaan teknologi maju sebagai sarana akselerasi tingkat industrialisasi dan lompatan menuju status yang lebih kompetitif secara ekonomi (Jin, 1992.). Pada intinya program tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan peringkat Malaysia menjadi sebuah negara maju dan negara industri penuh menjelang tahun 2020. Kemajuan yang ingin dicapai tidak berarti hanya di bidang perekonomian saja, akan tetapi meliputi bidang sosial, politik, kerohanian serta perpaduan antara sosial dan nasional. Hal-hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya untuk menciptakan suatu keadaan di masyarakat yang berdasar keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu kehidupan dan lainnya. Di dalam agenda Vision 2020 Malaysia bertujuan untuk menjadi negara maju dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan menjadi sebuah negara industri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Malaysia dijalankan dengan sistem perekonomian yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan jangka panjang yang telah dibuat oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 1970-an, NEP/DEB kemudian dilanjutkan dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang kemudian melahirkan Vision 2020.

D. Pariwisata sebagai sumber ekonomi baru.

Sektor pariwisata tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia. Demikian juga hal ini juga terjadi di Malaysia, dimana pertumbuhan industri pariwisata di Malaysia pada tahun 1970- an terbilang konsisten dan meningkat. Penurunan hasil industri pertambangan dan perkebunan di Malaysia juga mendorong pemerintah mendirikan Tourism Development Corporation (TDC) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Industri dan Perdagangan pada tanggal 10 Agustus 1972 untuk menjadi organisasi yang berwenang dalam upaya pembangunan sarana pariwisata di Malaysia. Badan ini kemudian membuat kebijakan yang disebut *Tourism Development Plan* yang tujuannya untuk mengatur industri pariwisata dengan melakukan pembangunan-pembangunan di sejumlah wilayah kota besar di Malaysia. Beberapa kota besar ini adalah kota-kota yang menjadi pusat kegiatan perekonomian dan kegiatan politik negara, seperti misalnya Kuala Lumpur, Malaka ,dan Georgetown, Para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru negeri maupun luar negeri umumnya juga memiliki tujuan, urusan bisnis, wisata, maupun kunjungin diplomatis. Tiga kota besar ini adalah kota yang mayoritas penduduknya didominasi oleh etnis China yang juga memiliki andil dalam penyediaan berbagai fasilitas pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti penginapan atau hotel, restoran, dan berbagai jasa dan pelayanan di berbagai pusat perdagangan. TDC adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan koordinasi sarana dan prasarana pariwisata di Malaysia yang sejak waktu berdirinya juga mengalami berbagai macam kesulitan pada proses pembangunan sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata juga adalah kelanjutan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya yakni kebijakan kebudayaan dan kebijakan ekonomi New Economic Policy (NEP). Namun TDC harus mengalami berbagai kesulitan dalam proses pembangunannya dikarenakan rumitnya birokrasi. Kewenangan TDC lainnya selain mengurus perijinan dan birokrasi pembangunan sarana-prasarana pariwisata, lebih jauh juga berfungsi dalam pengawasan kelestarian etnisitas di Malaysia serta melakukan pengawasan

atas komposisi etnisitas dalam total tenaga kerja yang diserap oleh industri pariwisata (Wells, 1982).

Di bawah naungan Kementerian Seni, Kebudayaan, dan Pariwisata. TDC pun kemudian berganti nama menjadi Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). Berbeda dengan TDC, MTPB lebih memegang peran dalam upaya-upaya promosi, koordinasi, dan perencanaan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata disamping memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing *wilayah* di Malaysia yang belum terekplorasi. Selain peningkatan angka pariwisata, ada akibat positif lain yang diperoleh Malaysia, yaitu adanya proses kesetaraan pembangunan antara kota besar dan pedesaan. Kegiatan promosi atau marketing yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Malaysia atau MTPB menunjukkan hasil bahwa sektor pariwisata mengalami peningkatan yang lebih baik dengan mengadakan program promosi wisata selama tahun 1990 dan 1994.

Tabel 2. GDP Malaysia dari pariwisata 1989-1994

GDP yang bersumber dari sektor pariwisata						
Malaysia	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Satuan Mata Uang lokal (juta)	3.931	5.718	5.908	6.322	6.821	10.476
Satuan US \$ kurs 2013	2.834	3.970	3.918	4.087	4.152	6.685
Pertumbuhan (%)	30.2	40	-1,3	4.3	1.5	61

sumber: www.WTTC.org, 2018

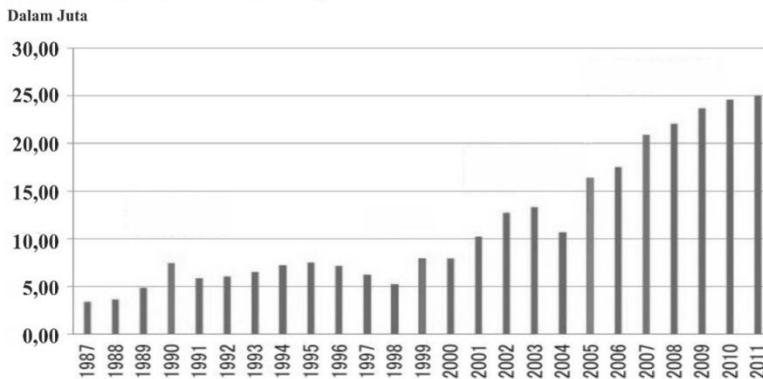
Sebagai negara yang berkeinginan untuk menjadikan pariwisata menjadi komoditas potensialnya, Malaysia harus meningkatkan berbagai bentuk sarana dan prasarana yang dapat mendorong wisatawan. Perbaikan infrastruktur harus dilakukan di berbagai bidang, Malaysia selain melakukan perbaikan sistem keamanan nasionalnya juga melakukan perbaikan infrastruktur, tujuan dari hal tersebut adalah *untuk* mendukung dan sebagai penunjang bangkitnya dunia pariwisata Malaysia akibat krisis

ekonomi 1998 dan isu terorisme global yang melanda dunia Islam dengan memperbaiki fasilitas dan pelayanan secara terus menerus, dimana Malaysia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa dipastikan juga terkena imbasnya. Perbaikan di bidang infrastruktur menjadi sangat penting mengingat tuntutan dari konsumen mengingat biaya yang telah dikeluarkan konsumen akan berbanding lurus dengan fasilitas dan kualitas service yang mereka inginkan. Pertumbuhan industri pariwisata di tahun yang akan datang itu sendiri juga akan dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur. Jika Malaysia tidak mengembangkan infrastruktur sesuai kebutuhan dan tuntutan jaman, maka pertumbuhan pariwisata di Malaysia juga akan berjalan stagnan. Perbaikan dan penambahan infrastruktur yang utama dilakukan adalah pada daerah tujuan wisata baru yang kurang atau belum begitu dikenal, hal tersebut bertujuan agar dapat menarik wisatawan dengan variasi tujuan wisata yang dimiliki Malaysia, tentu juga untuk menghindari kejenuhan yang para wisatawan terhadap obyek wisata yang telah umum ditawarkan. Di Malaysia terdapat sekitar 6.087 lokasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Malaysia yang kesemuanya perlu diperhatikan perawatan dan perbaikan infrastrukturnya secara terus menerus secara continue (Habibah, 1994). Kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur masing-masing mempunyai ciri-ciri dan pariwisata unggulan, dan pemerintah Malaysia berupaya untuk menyodorkan seluruh tempat kunjungan yang terpilih. Hampir semua bentuk hiburan dan tempat-tempat wisata dikembangkan di Malaysia seperti berbagai macam kesenian daerah, berlayar, wisata taman laut, parade, safari, hingga kejuaraan balap otomotif yang bertaraf internasional. Tempatnya tersebar mulai dari Semenanjung Malaysia yang di antaranya terdiri dari Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, sampai dengan daerah yang berada di Pulau Kalimantan yang berbatasan darat dengan Indonesia, yaitu Sabah, Sarawak dan Kuching. Jika ditengok kembali Kuala Lumpur sebagai ibukota Malaysia yang populer dengan dengan sebutan KL pada tahun 1800-an adalah sebuah daerah pertambangan yang penduduknya bermata pencaharian sebagai

pedagang biji timah di Kuala Sungai Gombak dan Sungai Klang, sekarang daerah ini telah berubah menjadi pusat perdagangan. Selain dari wisata kota, Malaysia juga mempunyai wisata yang mencerminkan nuansa pedesaan misalnya Perlis lalu Kedah Darul Aman, daerah ini dikenal sebagai "Lumbung Padi Malaysia". Seiring menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke Malaysia pasca isu terorisme global dan penyebaran wabah penyakit Flu Burung dan SARS, membuat pemerintah Malaysia harus membangun kembali dunia pariwisatanya agar ekonomi masyarakat dan devisa negara dapat kembali meningkat. Hasil dari pembangunan tersebut terlihat dari promosi yang terus-menerus dan pengkonsepian yang jelas sehingga membuat angka pariwisata kembali menggeliat meskipun berjalan lambat. Dari catatan statistik yang ada, pada 1990 angka kedatangan pengunjung ke Malaysia berjumlah 7,445,908 orang, dan jumlah pendapatan yang masuk ke kas negara Malaysia sebesar RM 4,501,000,000 (Mosbah, 2014).

1. Visit Malaysia Year 90

Pada tahun 1990 Malaysia mengadakan festival yang bertajuk "*Fascinating Malaysia. Year of Festival*". Sebagai media promosi rangkaian acara ini pemerintahan Malaysia menggunakan logo dan slogan yang menonjolkan salah satu bangunan terkenal yang dilestarikan di Malaysia yakni Gedung Sultan Abdul Samad. Kegiatan yang ditonjolkan oleh Malaysia dalam sepanjang tahun ini adalah berupa 84 acara besar, 14 festival dan 9 pameran. Ketika program ini diadakan, angka kedatangan wisatawan dalam catatan statistik menjadi 7,445,908 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1989 yang hanya berada pada angka 4,846,320 wisatawan atau pengunjung (Salleh, Othman, & Ramachandran, 2007).



Grafik 3. kedatangan wisatawan Malaysia 1987-2011

Sumber: Mosbah, 2014

Strategi Malaysia mengadakan Visit Malaysia Year 90 terbukti sukses untuk mengundang wisatawan ke Malaysia namun seiring dengan selesainya program pariwisata Visit Malaysia Year 90, maka kunjungan wisatawan mancanegara di tahun berikutnya juga mengalami penurunan. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi melanda Asia, jumlah pengunjung yang datang ke Malaysia mengalami penurunan menjadi 5,550,748 orang meskipun pendapatan tahun 1998 lebih baik di bandingkan tahun 1990 yaitu RM 8,580,000,000. Kemudian tahun 2001 angka pengunjung yang masuk ke Malaysia menjadi 12,775,073 orang dengan meraup pendapatan sebesar RM 24,221,500,000.

Pada tahun 2002 dan tahun 2003, dunia pariwisata mengalami kendala yang serius akibat terorisme dan penyebaran wabah penyakit, sehingga mengalami penurunan yang berdampak pada ekonomi nasional. Dengan membuat kebijakan mengenai masalah terorisme dan wabah penyakit secara perlahan pariwisata Malaysia mulai bangkit. Tingkat kedatangan turis ke Malaysia meningkat hingga 30%. Malaysia dikunjungi oleh sekitar 13 juta pelancong dari berbagai negara, dan pada tahun 2005 angka kedatangan meningkat menjadi 16 juta pelancong. Hal tersebut juga

berdampak pada industri perhotelan yang juga mengalami peningkatan, di

Tabel 3. Kedatangan Wisatawan ke Malaysia 1974-2004

Kedatangan Wisatawan dan Penerimaan dari Pariwisata di Malaysia, 1975-2004

Tahun	Kedatangan Turis Internasional	Tingkat Pertumbuhan (%)	Penerimaan Pariwisata (Juta RM)	Tingkat Pertumbuhan (%)
1975	1,461,553	-	289.50	-
1980	2,067,020	-	618.9	-
1985	3,109,106	-	1543.1	-
1989	4,846,320	-	2802.7	-
1990	7,445,908	53.64	4500.0	60.56
1991	5,847,213	-21.47	4300.0	-4.44
1992	6,016,209	2.89	4595.4	6.87
1993	6,503,860	8.11	5065.8	10.24
1994	7,197,229	10.66	8298.3	63.81
1995	7,468,749	3.77	-9174.9	10.56
1996	7,138,452	-4.42	10354.1	12.85
1997	6,210,921	-12.99	9699.0	-6.33
1998	5,550,748	-10.63	8580.0	-11.54
1999	7,931,149	42.88	13450.0	56.76
2000	10,221,582	28.88	17335.4	28.89
2001	12,775,073	24.98	24221.5	39.72
2002	13,292,010	4.05	25781.1	6.44
2003	10,576,915	-20.43	21291.1	-17.42
2004	15,703,406	48.47	29651.4	-39.30

Sumber: Salleh, Othman, & Ramachandran, 2007

Tingkat sektor hunian hotel-hotel di Malaysia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 tingkat kunjungan ke hotel-hotel di Malaysia mencapai 13,6 juta orang, sedangkan pada tahun 2005 meningkat menjadi 24 juta orang yang memanfaatkan jasa hotel sebagai sarana bagi para pelancong dari luar negeri untuk menginap (Salleh, Othman, & Ramachandran, 2007). Sektor manufaktur merupakan penyumbang pemasukan negara yang besar untuk perekonomian Malaysia, namun industri pariwisata Malaysia juga memberikan andil yang besar

dalam menjalankan roda perekonomian negara, misalnya pariwisata Malaysia menghasilkan 30 milyar Ringgit Malaysia pada tahun 2005 (Kadir, 2012). Angka pencapaian tersebut dinilai belum cukup memadai jika dibandingkan dengan potensi wisata yang dimiliki oleh Malaysia secara keseluruhan. Oleh karena itu, walaupun belum sepenting sektor manufaktur, namun dengan melakukan promosi wisata dan konsep yang tepat sesuai dengan keinginan pasar serta proses yang dijalani secara terus-menerus diharapkan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang perekonomian yang besar untuk negara.

E. Adaptasi Konsep Pariwisata Malaysia Dalam Menghadapi Pasar Global.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat penting untuk perekonomian Malaysia dalam kurun waktu dasawarsa 2000-an. Arus keluar-masuk manusia yang datang dan pergi dari seluruh dunia akan meningkat seiring dengan kebutuhan manusia untuk berbagai urusan baik bisnis maupun non bisnis. Dengan meningkatnya arus lalu lintas global, maka setiap negara di dunia haruslah siap dengan keadaan tersebut. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat dielakkan lagi, karena dengan datangnya orang asing, terutama dari negara maju ke suatu negara tertentu pasti mereka menginginkan sebuah keadaan lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di negara asalnya. Hal ini menuntut para penyedia jasa pariwisata harus mampu menyediakan apa yang diinginkan para wisatawan asing yang datang ke tempat tujuan.

1. Nation Branding Malaysia

Keinginan setiap wisatawan yang datang ke Malaysia sangat beragam. Untuk itu untuk mengakomodasinya diperlukan suatu konsep yang matang yang dapat membaca setiap keinginan dan setiap keadaan. Malaysia mencoba memanfaatkan keadaan yang ada didalam negaranya, misalnya dari segi penduduk Malaysia terdiri dari berbagai macam suku dan ras. Ras Melayu adalah ras yang dominan

di Malaysia dengan presentasi sekitar 50.1% yang kemudian diikuti oleh etnis China, India dan bangsa-bangsa dari Asia lainnya, sehingga tidak salah bila Malaysia kemudian memilih semboyan “*Truly Asia*” sebagai tajuk dari nation brandingnya, dimana Malaysia adalah Asia yang sebenarnya. Karena jika wisatawan ataupun pengunjung datang ke Malaysia tidak ubahnya seperti telah datang ke seluruh penjuru Asia. Hal tersebut merupakan salah satu *konsep multi-kebudayaan* yang dapat diangkat untuk menjadi sebuah seni dan pertunjukan di setiap tahunnya. Semboyan dan logo Malaysia “*Tuly Asia* ini dimunculkan pada tahun 1999 atas kerjasama pemerintah Malaysia dan sebuah agen advertising internasional bernama TBWA-ISC. Ide awal penciptaan logo dan slogan ini berawal dari krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang melanda dunia dan memberi dampak terhadap penurunan angka pariwisata di Malaysia, sehingga Malaysia merasa perlu untuk membuat slogan yang merepresentasikan multikulturalisme yang ada di dalam negaranya, serta menonjolkan image positif yang dimiliki untuk mempromosikan pariwisatanya sehingga mengurangi kemungkinan dampak negative dari perkembangan sosial maupun politik dari lingkungan global maupun regional. Seperti yang tertera dalam website isc “*Malaysia cannot just compete on beaches, shopping, nightlife*” (“*Malaysia tidak bisa hanya mengandalkan pantai, belanja, dan dunia malam*”) juga ucapan dari Mantan perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi “*The time is now, the place is Malaysia. There is so much to explore, so much to experience.*” (“*Waktunya sekarang, tempatnya adalah Malaysia. Ada begitu banyak yang bisa dijelajahi, begitu banyak pengalaman.*”) (ISC, 2018). Dengan kata lain lewat nation branding ini Malaysia berusaha menyampaikan bahwa Malaysia dengan berbagai keanekaragaman dan obyek wisata didalamnya adalah satu kesatuan destinasi wisata.



Gambar 2. Logo Malaysia Truly Asia

sumber: thousandwonders.net

Pembangunan menara Kembar PETRONAS di Kuala Lumpur adalah suatu bentuk kemajuan peradaban yang ingin ditunjukkan Malaysia. Selain menjadi sebuah kebanggaan, simbol majunya kebudayaan Malaysia dan *prestige*, juga merupakan sebuah konsep wisata baru yang ditawarkan oleh Malaysia yaitu *Eco-Turism* atau wisata belanja. Karena di dalam menara PETRONAS tersebut berdiri berbagai macam pusat bisnis dan pusat perbelanjaan dan gedung tersebut dicitrakan seakan-akan bangunan tersebut adalah gedung WTC di Malaysia. Perubahan iklim pariwisata global yang sekarang lebih cenderung ke kawasan regional kemudian mendorong pemerintah Malaysia untuk membidik pasar pariwisatanya ke lingkup Asia, akan tetapi wisatawan dari negara maju juga tetap diutamakan. Jika ditengok dari segi kebudayaan yang ada di Malaysia dan dibandingkan dengan negara Timur Tengah maka dapat juga disebut sebagai satu regional walaupun bukan berdasarkan letak geografisnya, akan tetapi berdasar faktor kesamaan agama dan kebudayaannya. Dimana kebudayaan Islam telah ada di dalam lingkup masyarakat Malaysia begitu juga dengan masyarakat Timur Tengah. Dari sudut pandang kesamaan inilah pemerintah Malaysia secara logis mampu mengerti dan memenuhi kebutuhan dari para wisatawan yang berasal

dari negara-negara Timur Tengah, seperti kebutuhan makanan yang memenuhi standar halal dan masjid sebagai tempat beribadah telah tersedia di berbagai tempat di Malaysia dan tentunya juga mudah untuk dijangkau para wisatawan. Kemudian faktor lain yang tak kalah penting adalah adanya rasa aman dan nyaman tanpa harus ada sentimen dan diskriminasi yang tentu saja mengurangi rasa nyaman jika ada. Akan tetapi secara umum bagi Malaysia, Islam adalah aman, dan Islam adalah sejahtera. Untuk pasar Timur Tengah, Malaysia juga mempunyai keindahan alam yang segar dan hijau yang bisa dijual kepada pelancong dari timur tengah, karena kondisi alam di Malaysia lebih hijau dan lebih indah dibandingkan dengan kondisi di Timur Tengah yang sebagian besar adalah padang pasir.

Dalam bidang olahraga, Malaysia melihat bahwa saat ini ada beberapa event ataupun cabang olahraga yang telah menjadi suatu fenomena global dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan prestige suatu bangsa ataupun untuk kepentingan lainnya termasuk kepentingan politik yang kemudian dikonsepsi kedalam *sport tourism*. Karena itulah kemudian Malaysia membangun Sirkuit Sepang lengkap dengan segala fasilitas moderennya yang didesain dapat menampung puluhan ribu penonton dalam sekali pertunjukan balap, dan tujuan utama dari pembangunan Sirkuit Sepang ini adalah agar dapat menyelenggarakan *Formula One* atau *MotoGP*. Karena pagelaran tersebut memiliki daya tarik yang kuat dan merupakan cabang olahraga yang prestisius. Selain dari itu Malaysia adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang yang paling sering disinggahi klub-klub sepakbola elite Eropa. Chelsea, Newcastle United, Liverpool adalah beberapa contoh kesebelasan yang sering mampir ke Malaysia dalam tour mereka ke Asia di antara jeda musim kompetisi. Manchester United adalah klub sepakbola dari dataran Eropa yang paling sering singgah dalam lawatan tounya di Asia, Manchester United juga telah membuka gerai resminya yang disebut dengan Manchester United Mega Store di Malaysia. Gerai tersebut menjual

merchandise asli MU yang kemungkinan di Asia Tenggara hanya ada di Malaysia saja. Bidang pendidikan dan kesehatan juga tidak luput dari sasaran Departemen Pariwisata Malaysia. Di Malaysia telah ada sekitar 600 institusi pendidikan tinggi milik pemerintah maupun milik swasta untuk menampung para pelajar dari seluruh penjuru dunia yang berminat untuk mencari ilmu di Malaysia. Keunggulan institusi tersebut adalah adanya program kembar, yaitu ijazah yang di keluarkan adalah ijazah dari Amerika, Inggris, Australia. Malaysia telah mempunyai rumah sakit yang bertaraf internasional dan telah terakreditasi oleh Departemen Kesehatan Malaysia lengkap dengan dokter spesialis dan fasilitas medis yang lengkap. Hal ini Malaysia pelajari dari kesuksesan Singapura menarik wisatawan asing dengan konsep *Medical Tourism*. Menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan regional Asia Tenggara juga tak luput dari perhatian pemerintah Malaysia. Akan tetapi kerjasama belum berjalan dengan baik dan optimal, karena masing-masing negara masih kurang koordinasi meskipun kerjasama tersebut telah berlangsung selama 1 dasawarsa. Meskipun potensi ASEAN sangat besar di bidang pariwisata namun strategi bersama untuk memasarkan Pariwisata ASEAN dalam satu paket konsep pariwisata belum mampu dilakukan,. Koordinasi dan komunikasi antar bangsa yang sebenarnya adalah tumpuan utama dalam memajukan pariwisata ASEAN.